

Perempuan Berdaya, Indonesia Maju



Pemberdayaan perempuan adalah proses penyadaran dan pembentukan kapasitas (*capacity building*) terhadap partisipasi yang lebih besar seperti keluasaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan serta tindak transformasi yang mengarah pada perwujudan persamaan derajat yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki.

Pemberdayaan Perempuan merupakan pintu masuk untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga, masyarakat dan bangsa. Ada 8 aspek yang sering digunakan untuk mengukur kesejahteraan suatu bangsa, yaitu : tingkat pendapatan, kependudukan, Kesehatan, Pendidikan, pekerjaan, konsumsi masyarakat, perumahan dan sosial budaya.

Secara global, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia ranking 107 dari 189 negara. Bahkan di tingkat Asean ranking 5 dari 10 negara. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur kualitas hidup manusia. Data IPM Indonesia 2011-2022 menunjukkan status IPM Perempuan masih sedang di bandingkan IPM Laki-laki. Rendahnya IPM Perempuan menjadi penyumbang sulit meningkatnya IPM Indonesia dalam skala regional apalagi global. IPM ini diukur dari aspek Kesehatan (angka harapan hidup), Pendidikan dan pendapatan per kapita.

Angka harapan hidup Perempuan di 25 wilayah di Indonesia masih dibawah angka rata-rata nasional. Ini artinya tingkat kematian ibu masih tinggi di lebih dari 50% wilayah provinsi di Indonesia. Demikian juga partisipasi Pendidikan dan lamanya sekolah bagi Perempuan, 16 wilayah provinsi masih di bawah angka rata-rata nasional. Tingkat konsumsi (belanja per kapita) di 25 provinsi pun masih dibawah angka rata-rata nasional.

Data-data tersebut berbicara 3 hal penting dalam upaya mencapai standar kesejahteraan bersama, yakni : Kesehatan, Pendidikan dan ekonomi (pendapatan). Rendahnya kondisi ini disebabkan oleh masih rendahnya capaian keadilan gender di Indonesia. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia diantara negara-negara G20 (meski Indonesia memegang posisi Presidensiil) masih sangat rendah yakni nomor 4 terendah dari 19 negara G20 termasuk Uni Eropa. IPG ini diukur dari partisipasi Perempuan di Parlemen, partisipasi Perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan Perempuan.

Data IPG Nasional menyebutkan bahwa hanya 4 provinsi yang berada di atas IPG rata-rata Nasional yaitu : Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Maluku Utara dan Sulawesi Tengah. 30 provinsi lainnya masih menjadi PR yang sangat besar karena berada di bawah angka rata-rata nasional. Artinya pembangunan yang terjadi masih belum mengarusutamakan gender, bahkan terjadi ketidakadilan gender.

Lalu apa artinya?

Dalam konteks gerak Wanita Katolik RI untuk mengambil **Peran Perempuan Mewujudkan Kesejahteraan Bersama di NKRI**, ini menjadi peluang untuk dengan serius dan konsisten mulai bergerak dalam kapasitas dan konteks lokalitas dimana WKRI bekerja. Realitas di wilayah kerja adalah panggilan untuk membuat perubahan bagi Perempuan yang muaranya adalah keluarga, masyarakat dan bangsa. Sebagai ormas yang optimis, melihat semua realitas sepahit apapun sebagai peluang untuk bertindak, mewujudkan harapan Ibu Pendi dan terus menjadi organisasi yang mandiri, handal dalam semangat asih asah asuh dan berkembang dalam solidaritas dengan tetap memberi ruang bagi semua pihak untuk ambil bagian sesuai kapasitasnya (subsidiaritas). 100 tahun Wanita Katolik RI menjadi momentum untuk bertolak ketempat yang lebih dalam (Lukas 5:4), karena *"Kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan manusia-manusia zaman ini, khususnya mereka yang miskin dan menderita, adalah kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus"* (Gaudium et Spes art. 1).

Liest Pranowo

Diolah dari materi seminar dan berbagai sumber



Kongres XXI Wanita Katolik RI Dibuka

Jumat, 28 Oktober 2023 merupakan hari dimana Kongres XXI Wanita Katolik RI dimulai. Diawali dengan misa pembukaan dengan Ignatius Kardinal Suharyo Hardjoatmodjo sebagai konselebran utama.

Dalam homilinya, Kardinal menyampaikan bahwa karya WKRI di seluruh Indonesia dalam keyakinan iman adalah bagian karya agung Tuhan. Oleh karenanya, beliau berharap semoga WKRI membaca kehendak Allah dalam tanda tanda iman dengan iman. “Program Yesus itu sama dengan program WKRI utk memajukan kesejahteraan bersama,” ujar Kardinal menambahkan.

Acara dilanjutkan dengan upacara pembukaan Kongres XXI. Hadir dalam acara pembukaan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati yang sekaligus membuka secara resmi Kongres XXI Wanita Katolik RI Tahun 2023.

Mengawali pembukaan Kongres XXI, diselenggarakan pada hari yang sama, seminar dengan judul Laudate Deum dan Peran Wanita Katolik RI ke Depan. Pembicara dalam seminar adalah Dra. Lenny Nurhayati Rosalina, MSc dari Bappenas yang memberi Gambaran Situasi Perempuan Indonesia. Dilanjutkan pembicara kedua yaitu Dina Nurdinawati, S.Kpm, M.SI yang membahas Gender dan Perubahan Iklim. Terakhir adalah Romo Dr. Ferry Sutrisna Wijaya dengan topik Wanita Katolik RI Membuat Perubahan. Seminar tersebut dimoderatori oleh Liest Pranowo dari DPP Wanita Katolik RI. Semoga pandangan dan masukan dari para pembicara seminar dapat menjadi referensi bagi para pengurus Wanita Katolik RI di tingkat manapun ketika menyusun program kerja.



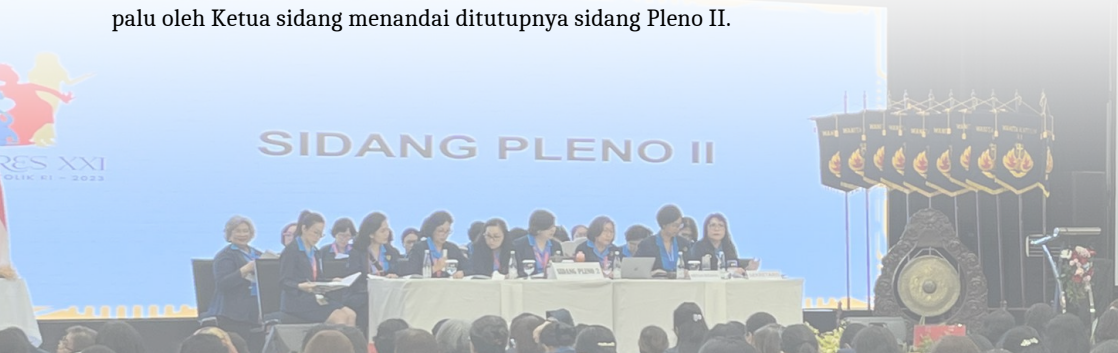
Sidang Pleno I dan II

Tingkat kepengurusan tertinggi dalam Wanita Katolik RI adalah Dewan Pengurus Pusat (DPP). Usia organisasi yang tidak muda lagi semakin mematangkannya dalam tata kelola organisasi. Salah satu hajatan nasional adalah Kongres. Kongres Wanita Katolik RI diadakan setiap lima tahun sekali. Tahun 2023 ini adalah Kongres XXI yang diadakan oleh Wanita Katolik RI.

Agenda hari kedua, Jumat, 28 Oktober 2023 adalah Sidang Pleno I dan II. Sidang Pleno I dimulai pukul 16.13 dipimpin oleh Ketua Presidium DPP Wanita Katolik RI Ibu Justina Rostiawati dan Wakil Sekjen Ibu Lily Azali. Pada sidang pleno I ini dibacakan, disepakati dan ditetapkan tata tertib Kongres. Ini dimaksudkan agar sidang-sidang berikutnya dan seluruh acara yang juga disepakati berjalan dengan baik dan lancar.

Beberapa ayat dalam pasal-pasal yang disampaikan tidak begitu saja disetujui oleh para peserta Kongres. Ada beberapa peserta mewakili DPD masing-masing mempertanyakan, tidak setuju atau menambahkan dan mengurangi beberapa hal dalam tata tertib tersebut. Pada akhirnya sidang Pleno dapat mengesahkan hasilnya pada pukul 18.44. Salah satu hasil yang disepakati adalah pimpinan sidang Pleno II yaitu Ketua Elisabet Natalia Prawitasari dari DPD Bali dan Sekretaris Yenny Kaunang yang merupakan utusan dan DPD Sulawesi utara.

Sidang Pleno II telah disahkan pada pukul 23.58 dengan beberapa hasil yaitu telah disampaikan LPJ DPP Wanita Katolik RI periode 2018 - 2023, DPD-DPD telah memberikan pandangan umum, DPP Wanita Katolik RI periode 2018 - 2023 dinyatakan demisioner, LPJ tersebut diterima dengan catatan. Selanjutnya dilakukan serah terima kepemimpinan kepada Pemimpin sidang Pleno II. Pemimpin sidang kemudian menyerahkannya kepada penanggungjawab Kongres XXI Wanita Katolik RI. Ketukan palu oleh Ketua sidang menandai ditutupnya sidang Pleno II.



Terbang tanpa Jam Terbang

"Saya masih *anyaran* di Wanita Katolik RI, belum bisa berbicara banyak tentang organisasi ini". Demikian diungkapkan Romo Leonardus Ari Wardana, SCJ.

Meski baru setahun menjadi penasihat rohani WKRI DPD Timika, Romo Ari, begitu dia disapa, tetap berusaha hadir ketika dibutuhkan. Seperti yang dituturkan oleh Ketua Presidium WKRI DPD Timika, Irene Kipimbob, kehadiran Romo Ari sangat dirasakan melalui nasihat dan pendampingannya kepada pengurus.



Melalui program kerja yang dilaksanakan, Romo Ari melihat bahwa WKRI DPD Timika telah mengambil banyak peran baik di Gereja maupun di masyarakat.

"Wanita Katolik RI ini banyak peran dan selalu diberi peran dalam pelayanan. Salah satunya dalam IYD," ungkapnya.

Romo Ari berharap WKRI DPD Timika dapat merangkul banyak pihak dan berkolaborasi dalam berbagai kegiatan yang direncanakan baik jangka pendek maupun jangka panjang. "Harapan saya, organisasi ini semakin terlibat dalam berbagai persoalan riil di masyarakat yang menjadi keprihatinan banyak pihak, salah satunya soal stunting," lanjutnya.

Tentunya, sebagai penasihat rohani, Romo Ari akan berusaha mendampingi pengurus WKRI DPD Timika dalam setiap pelaksanaan programnya.

Komunikasi Jitu *ala* Elis



Salah satu tantangan di masa-masa sekarang adalah bagaimana kita bisa beradaptasi dengan teknologi informasi yang semakin maju

WKRI DPD Lampung, menjawab tantangan tersebut dengan memanfaatkan sosial media untuk berbagi informasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, terutama dalam masa kepemimpinan Elisabeth Sri Puryanti, sejak tahun 2015.

Bagi Elis, bergabung dengan Wanita Katolik RI membuka kesempatan untuk mengasah pola pikir, komunikasi dan pengelolaan waktu. Kemampuan komunikasinya menular pada kepengurusannya, terutama tim yang mengelola sosial media. Tidak heran, sosial media mereka terlihat aktif dan baik.

Perempuan yang berprofesi sebagai guru ini juga menyampaikan bahwa Ia merasa senang bergabung dengan WKRI salah satunya karena pengurusnya solid. "Yang lebih membahagiakannya lagi, saya melihat kaderisasi berjalan dengan baik dan sehat," ungkapnya.

Salah satu program yang masih berjalan saat ini adalah Ketahanan Pangan, di mana Elis turut menjadi pengegrak di wilayahnya. Bawa Botol Minum (BBM) yang merupakan tradisi di Wanita Katolik RI juga ia bagikan di dalam komunitas lainnya. Dan bisa dibilang, cukup berhasil.

Elis turut hadir sebagai utusan daerah ddalam Kongres XXI Tahun 2023 di Jakarta. Ia berharap, menyongsong 100 tahun WKRI, semoga kita semua dimampukan dalam mewujudkan semangat Asih Asah Asuh dalam kehidupan berorganisasi dan kehidupan sehari-hari.



GALERI FOTO

MISA SYUKUR PEMBUKAAN KONGRES XXI TAHUN 2023



PEKEREMPUAN MEWUJUDKAN KEMAJUAN BERSAMA DALAM KEKESATUAN REPUBLIK INDONESIA



REDAKSI

Chatarima Bima, Amadea,
Aurelia, Silvia, Erna, Yuni,
Kunherini, Erta, Mathilda

www.dppwkri.org

[@dpp_wkri](https://www.instagram.com/dpp_wkri)

[Dewan Pengurus Pusat Wanita Katolik RI](https://www.facebook.com/dppwkri)